



Sejarah dan Dampak Kebijakan Makan Siang Gratis: Studi Komparatif dan Implikasinya terhadap Pendidikan di Indonesia

Septian Prawijaya^{1,3}, Puteri Atikah², Fery Muhammad Firdaus³

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Medan

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan

³Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Yogyakarta

Surel: wijaya@unimed.ac.id

Abstract

The free lunch policy has been implemented in various countries as an effort to improve the nutrition and academic achievement of students. This study aims to analyze the history of the free lunch policy, compare it with the first country to implement it, and evaluate its impact on student nutrition and learning in Indonesia. This study uses a literature review method with a historical and comparative approach. Data was collected through literature studies from academic journals, policy reports, as well as primary and secondary sources related to free lunch policies in various countries. The study of free nutritious eating in this paper was conducted in the context of America and Japan. Free nutritious meal programs in the United States and Japan are successful because they are supported by sustainable policies, stable funding, and integration with education and health systems. In Japan, *the Kyūshoku program* is successful because of strict nutritional standards, school involvement in the provision of healthy food, and a shared eating culture that instills good habits from an early age. Meanwhile, in the United States, *the National School Lunch Program (NSLP)* was successful because it had the full support of the federal government, ensuring access to nutritious food for children from low-income families. Both countries show that the success of the program depends on long-term planning, government involvement, and nutrition education for students. Therefore, Indonesia needs to adapt policy models that are in accordance with local conditions, ensure the effectiveness of distribution, and conduct periodic evaluations to optimize benefits for students.

Keywords: Free Lunch Policy, Policy History, Student Nutrition, Education, Comparative Study

Abstrak

Kebijakan makan siang gratis telah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya meningkatkan gizi dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah kebijakan makan siang gratis, membandingkannya dengan negara pertama yang menerapkannya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap gizi dan pembelajaran siswa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan historis dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari jurnal akademik, laporan kebijakan, serta sumber primer dan sekunder terkait kebijakan makan siang gratis di berbagai negara. Kajian makan bergizi gratis dalam tulisan ini dilakukan dalam konteks Amerika dan Jepang. Program makan bergizi gratis di Amerika Serikat dan Jepang berhasil karena didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan, pendanaan yang stabil, serta integrasi dengan sistem pendidikan dan kesehatan. Di Jepang, program *Kyūshoku* berhasil karena adanya standar gizi ketat, keterlibatan sekolah dalam penyediaan makanan sehat, dan budaya makan bersama yang menanamkan kebiasaan baik sejak dini. Sementara itu, di Amerika Serikat, *National School Lunch Program (NSLP)* sukses karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah federal, memastikan akses makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada perencanaan jangka panjang, keterlibatan pemerintah, serta pendidikan gizi bagi siswa. Oleh karena itu, Indonesia perlu

mengadaptasi model kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, memastikan efektivitas distribusi, dan melakukan evaluasi berkala untuk mengoptimalkan manfaat bagi siswa.

Kata Kunci: Kebijakan Makan Siang Gratis, Sejarah Kebijakan, Gizi Siswa, Pendidikan, Studi Komparatif

PENDAHULUAN

Kebijakan makan siang gratis bagi siswa merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan mendukung keberhasilan akademik mereka (Merlinda & Yusuf, 2025; Rokhmaniyah et al., 2022). Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara dengan tujuan utama mengatasi masalah malnutrisi serta meningkatkan daya konsentrasi dan prestasi belajar siswa. Salah satu negara pertama yang menerapkan kebijakan ini adalah Swedia pada awal abad ke-20, yang kemudian diikuti oleh berbagai negara lain, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang (Maharani et al., 2024).

Sejarah menunjukkan bahwa program makan siang gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan siswa tetapi juga berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Rahmawati et al., 2024; Sukmana, 2022). Misalnya, di Amerika Serikat, *National School Lunch Program* (NSLP) yang dimulai pada tahun 1946 berhasil mengurangi angka kelaparan di sekolah dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Demikian pula, di Jepang, program makan siang sekolah telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan menu makanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa (Hock et al., 2022).

Di Indonesia, kebijakan makan siang gratis mulai menjadi wacana yang

semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan siswa. Beberapa program lokal dan inisiatif pemerintah daerah telah diterapkan, seperti di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendanaan, infrastruktur, kualitas gizi makanan, serta mekanisme distribusi yang efektif. Selain itu, perlu kajian mendalam mengenai sejauh mana program ini berdampak terhadap prestasi akademik siswa di Indonesia (Septiani et al., 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gizi yang cukup berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi dan daya ingat siswa. Studi dari *World Food Programme* (WFP) (2021) menemukan bahwa siswa yang menerima makanan bergizi di sekolah menunjukkan peningkatan skor akademik hingga 9% dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkannya. Selain itu, penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki akses ke makanan sehat memiliki tingkat kehadiran lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan perilaku (Thorndike et al., 2022).

Di Indonesia, kebijakan makan siang gratis mulai mendapat perhatian, terutama dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan siswa. Saat ini, beberapa program lokal dan inisiatif pemerintah daerah telah diterapkan, seperti Program Makan Gratis di Sekolah Dasar DKI Jakarta, serta program yang dijalankan oleh beberapa daerah lain. Namun, cakupan program ini masih terbatas dan belum

diterapkan secara nasional (Azizi & Vera, 2024).

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini di Indonesia mencakup beberapa aspek, di antaranya:

1. Penyediaan makan siang gratis bagi jutaan siswa membutuhkan anggaran yang besar dan keberlanjutan pendanaan yang kuat.
2. Ketersediaan dapur sekolah, distribusi makanan, serta penyimpanan bahan makanan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini.
3. Menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi siswa serta mempertimbangkan variasi makanan di berbagai daerah.
4. Makanan yang disediakan harus sesuai dengan kebiasaan makan dan preferensi budaya lokal agar dapat diterima dengan baik oleh siswa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada Januari 2025 bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus memberikan dampak positif terhadap partisipasi dan prestasi pendidikan. Program ini menargetkan hampir 90 juta anak dan ibu hamil dengan anggaran awal sebesar Rp71 triliun. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, karena penyediaan makan siang gratis dapat mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Dengan demikian, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di berbagai jenjang pendidikan berpotensi mengalami peningkatan (Maharani et al., 2024).

Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap penurunan angka putus sekolah. Penyediaan makanan bergizi di sekolah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk tetap bersekolah, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memperpanjang masa belajar anak hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Susanto, 2021). Lebih jauh, asupan gizi yang memadai berperan penting dalam meningkatkan fungsi kognitif dan daya konsentrasi siswa. Dengan kondisi tubuh yang lebih sehat dan energi yang cukup, siswa dapat lebih fokus dalam kegiatan belajar, sehingga meningkatkan prestasi akademik mereka (Harliawan, 2024). Hal ini berpotensi mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Richardson et al., 2022)

Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal pendanaan, logistik, dan standar kualitas gizi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, diperlukan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien agar program ini dapat berjalan berkelanjutan (Ayurisyah Dominata Dumiadi, 2025). Dari segi logistik dan infrastruktur, distribusi makanan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke daerah terpencil, menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan sistem yang efektif. Selain itu, standar kualitas gizi dalam penyusunan menu harus diperhatikan agar makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan anak-anak dan ibu hamil, dengan tetap mempertimbangkan keberagaman budaya dan preferensi lokal (Septiani et al., 2024).

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi katalisator penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Jika program ini dapat

dijalankan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya, maka dampak positifnya akan semakin signifikan dalam membangun generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Di Indonesia, konsep makan siang gratis di sekolah bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Beberapa program serupa pernah dicoba dalam skala terbatas, seperti Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang diperkenalkan pada tahun 1997 (Safitri & Fitriana, 2022). Namun, program ini mengalami berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan kendala distribusi. Baru pada tahun 2025, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan nasional yang lebih luas dan terstruktur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah serta menekan angka putus sekolah dengan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada hampir 90 juta anak dan ibu hamil (Srimayarti & Yenni, 2021).

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan makan siang gratis di Indonesia masih berada dalam tahap awal implementasi. Namun, Indonesia dapat belajar dari keberhasilan negara-negara seperti Swedia, Jepang, dan Amerika Serikat dalam mengelola program ini secara berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif, sistem distribusi yang efisien, serta pendekatan yang mengintegrasikan aspek pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah. Dengan perencanaan yang matang, program ini berpotensi membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi mendatang di Indonesia. Untuk itu, tulisan ini mengkaji

tentang sejarah kebijakan makan siang gratis di berbagai negara serta penerapannya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak kebijakan tersebut terhadap akses dan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan komparatif, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai implikasi kebijakan serupa bagi sistem pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian historis menggunakan kajian literatur yang digunakan untuk menganalisis peristiwa atau kebijakan di masa lalu guna memahami perkembangan, pola, dan dampaknya terhadap kondisi saat ini (Setyosari, 2016). Dalam penelitian ini, metode historis digunakan untuk menelusuri sejarah kebijakan makan siang gratis di berbagai negara serta melihat implikasinya terhadap pendidikan di Indonesia (Ribawati, 2022). Proses penelitian dimulai dengan menelusuri asal-usul dan perkembangan kebijakan makan siang gratis, mengidentifikasi negara pertama yang menerapkannya, serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan ini berkembang di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa.

Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui sumber sejarah yang terdiri dari sumber sekunder, seperti dokumen kebijakan, arsip pemerintah, laporan resmi, serta undang-undang terkait, dan sumber sekunder, seperti buku sejarah, artikel jurnal akademik, serta penelitian terdahulu (Jogiyanto Hartono, 2018). Setelah data terkumpul, penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan dalam

konteks pendidikan dengan membandingkan hasil penelitian dari berbagai negara untuk melihat pengaruh kebijakan makan siang gratis terhadap status gizi siswa dan prestasi akademik mereka. Faktor keberhasilan serta tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut juga akan dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Program Gizi di Amerika Serikat dan Jepang

Di Amerika Serikat, kebijakan dan program terkait gizi memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan gizi masyarakat. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar cakupan dan keberlanjutan program ini dapat ditingkatkan. Kebijakan di tingkat federal, negara bagian, dan komunitas telah dibuat untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dengan mempertahankan kesetaraan penerima manfaat (Chandran et al., 2023)

Undang-Undang Peningkatan Pertanian 2018, atau Farm Bill, adalah salah satu kebijakan utama yang berkontribusi pada mendukung keamanan gizi. Undang-undang ini memberikan dana federal sebesar \$428 miliar selama lima tahun, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk program bantuan pangan. Berbagai program seperti *Supplemental Nutrition Assistance Program* (SNAP), *Women, Infants, and Children* (WIC), dan *Food Distribution Program on Indian Reservations* memberikan dukungan finansial bagi keluarga berpenghasilan rendah agar mereka dapat membeli makanan yang cukup. Namun, di antara

program-program ini, hanya WIC yang secara langsung menekankan pada kualitas gizi makanan yang dibeli (Turner et al., 2021).

Selain itu, program berbasis sekolah pemerintah, seperti Program Makan Siang Nasional (NSLP) dan Program Sarapan Sekolah (SBP), memungkinkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan makanan yang kaya nutrisi dengan harga yang lebih rendah atau secara gratis. Program makan siang ini membantu sekitar 30 juta anak sekolah pada tahun 2019, dan program ini juga menyediakan sarapan sekolah untuk lebih dari 14 juta anak. Program Makanan Anak dan Orang Dewasa (CACFP) adalah salah satu program tambahan yang memberikan subsidi untuk makanan yang diberikan di pusat penitipan anak, program setelah sekolah, rumah sakit, dan tempat penampungan darurat (Calvert et al., 2021). *Healthy Hunger-Free Kids Act*, yang membantu meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bernutrisi, telah mengubah kebijakan sekolah tentang standar gizi. Tidak hanya anak-anak, kelompok lansia juga memperoleh manfaat dari program bantuan pangan, termasuk Commodity Supplemental Food Program, Meals on Wheels, serta Senior Farmers' Market Nutrition Program, yang bertujuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap makanan sehat dan bergizi (Sanders et al., 2020).

Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan berbagai program edukasi gizi yang didanai oleh federal, seperti WIC, SNAP Education, dan Head Start. Program-program ini berupaya meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam memilih makanan yang sehat. Namun, meskipun berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang gizi, program ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan karena adanya batasan usia

serta tingkat partisipasi yang masih rendah (Chote et al., 2022).

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kualitas gizi, pemerintah mulai mengembangkan program insentif keuangan guna mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli dan mengonsumsi lebih banyak makanan bergizi. Sejak tahun 2008, pemerintah mulai mengalokasikan dana untuk proyek insentif, termasuk program yang memberikan dorongan finansial bagi penerima SNAP agar lebih banyak membeli buah dan sayur di pasar petani maupun supermarket. Salah satu proyek percontohan pertama yang diuji adalah *Healthy Incentives Pilot (HIP)* di Massachusetts, yang menunjukkan bahwa insentif ini dapat meningkatkan konsumsi buah dan sayur di kalangan penerima manfaat.

Keberhasilan program ini kemudian mengarah pada pengesahan *Food Insecurity Nutrition Incentive (FINI)* melalui *Farm Bill 2014*, yang mengalokasikan dana sebesar \$100 juta selama lima tahun untuk hibah insentif SNAP. Dalam *Farm Bill 2018*, program ini diperluas menjadi *Gus Schumacher Nutrition Incentive Program (GusNIP)*, dengan anggaran sebesar \$250 juta selama lima tahun. Program ini mencakup dua jenis insentif utama: subsidi pembelian makanan bergizi bagi peserta SNAP, yang masih mensyaratkan pendanaan tambahan dari sumber nonfederal, serta program resep produk segar, yang memungkinkan individu menerima rekomendasi khusus untuk konsumsi buah dan sayur tanpa syarat tambahan (Gosliner et al., 2022).

Selain program bantuan pemerintah, sistem pangan amal di Amerika Serikat juga memainkan peran

besar dalam membantu masyarakat yang mengalami kurangnya keamanan pangan. Sistem ini terdiri dari berbagai jaringan bank makanan, pantri makanan, serta program makanan siap saji yang tersebar di seluruh negeri. Organisasi seperti Feeding America, yang menaungi lebih dari 200 bank makanan dan 60.000 organisasi mitra, berkontribusi dalam mendistribusikan makanan kepada komunitas yang membutuhkan. Sebagian besar makanan dalam sistem ini berasal dari berbagai sumber, termasuk donasi dari petani, distributor, dan pengecer, serta dana federal yang dialokasikan melalui *The Emergency Food Assistance Program (TEFAP)* dan *Commodity Supplemental Food Program*. Hingga kini, tantangan utama dalam sistem pangan amal adalah bagaimana mengalihkan fokus dari sekadar kuantitas makanan yang didistribusikan ke peningkatan kualitas gizi makanan yang diberikan (Chandran et al., 2023).

Menanggapi hal ini, banyak organisasi mulai menerapkan strategi baru untuk memperbaiki kualitas gizi makanan dalam sistem pangan amal. Salah satu inisiatif terbaru adalah penerapan sistem peringkat gizi, yang dikembangkan oleh *Robert Wood Johnson Foundation's Healthy Eating Research Program*. Sistem ini mengklasifikasikan makanan berdasarkan tingkat kesehatannya, dengan kategori hijau (pilihan sehat yang disarankan), kuning (pilihan yang dapat dikonsumsi sesekali), dan merah (pilihan yang sebaiknya dihindari) (Holford & Rabe, 2024). Penerapan sistem ini memberikan banyak manfaat, baik bagi organisasi penyedia makanan maupun bagi penerima manfaat. Dengan adanya klasifikasi ini, USDA dapat menggunakannya untuk menentukan standar makanan yang dibeli dalam program TEFAP, sedangkan pengecer dan donatur dapat memilih makanan yang lebih

sehat untuk didonasikan. Bank makanan dan pantri makanan juga dapat memanfaatkan sistem ini untuk merancang kebijakan gizi yang lebih baik, sehingga makanan yang tersedia bagi masyarakat memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Upaya-upaya ini mencerminkan pergeseran besar dalam kebijakan dan program pangan di Amerika Serikat, dari sekadar menyediakan makanan dalam jumlah besar menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keamanan gizi dan peningkatan kualitas makanan bagi masyarakat luas.

Kajian terhadap makan bergizi gratis juga dilakukan dalam konteks negara Jepang. Krisis pangan di perkotaan Jepang setelah Perang Dunia II menyebabkan sistem rationing, yang berarti membagi jatah makanan, dan ketidakamanan pangan bagi banyak orang. Namun, pada tahun 1955, industri Jepang berhasil pulih sepenuhnya berkat stimulus keuntungan cepat yang dihasilkan oleh pesanan perang di Semenanjung Korea dari tahun 1950 hingga 1953 (Isozaki & Isozaki, 2024). Sejak didirikan pada tahun 1946 hingga secara resmi diperkenalkan dalam menu pada tahun 1976, Program Makan Siang Nasional Jepang (*gakkō kyūshoku*, atau kadang-kadang disebut *kyūshoku*) dirancang sebagai kebijakan yang revolusioner dan proaktif. Kolonel Crawford F. Sams, kepala bagian kesehatan Markas Besar Umum (GHQ), menyebut pendudukan Jepang sebagai “eksperimen terbesar dalam hubungan manusia dalam sejarah” dan menekankan bahwa penyediaan makanan di sekolah merupakan faktor krusial dalam pemulihan negara. Pendudukan Jepang oleh Sekutu setelah Perang Dunia II menjadi sebuah eksperimen sosial besar dalam membangun kembali suatu negara.

Ia melihat bahwa menyediakan makanan di sekolah tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak tetapi juga berperan dalam mempercepat pemulihan Jepang secara keseluruhan. Dengan memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang cukup, Jepang dapat membangun kembali masyarakatnya dari dasar, yakni melalui anak-anak, yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. Program *kyūshoku* awalnya tidak hanya bertujuan memperbaiki pola makan, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi sosial, meskipun pada awalnya lahir sebagai respons terhadap krisis pangan pascaperang (Sanborn & Omori, 2024).

Makan siang sekolah, bersama dengan reformasi politik dan pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan generasi Jepang yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih sehat, lebih mandiri, dan demokratis. Protein hewani, khususnya protein susu, adalah kunci untuk perubahan ini (Auliawan & Harsiwi, 2025). Pola makan siang anak-anak di sekolah dasar dan menengah Jepang, yang dimulai pada tahun 1950 dan bertahan selama beberapa dekade, terdiri dari roti, satu atau dua lauk tambahan, dan susu bubuk skim yang direkonstitusi. Untuk menambah protein, lemak, dan mikronutrien yang kurang dalam pola makan anak-anak, lauk tambahan ini biasanya berupa sup atau semur. Hingga tahun 1970-an, kombinasi utama dari roti, susu, dan lauk tambahan ini dikenal sebagai *okazu* (Kolang & Nurita, 2024).

Namun, ada beberapa perubahan penting pada 1960-an dan awal 1970-an. Perubahan pertama adalah profesionalisasi dan institusionalisasi. Sejak tahun 1964, ahli gizi profesional Jepang telah bertanggung jawab untuk mengatur dan menyiapkan makan siang sekolah. Program ini berkembang menjadi sistem katering massal profesional pada akhir tahun 60-an,

melayani hampir seluruh siswa sekolah dasar negeri di Jepang, bersama dengan perbaikan logistik dan elemen lainnya (Hardi et al., 2023). Menu makan siang mengalami perubahan kedua. Dua hal penting harus diperhatikan. Pertama, ekonomi dan logistik Jepang mulai menggunakan mie dan sumber karbohidrat lainnya sebagai pengganti roti. Di Museum Makan Siang Sekolah, replika menu makan siang tahun 1969 menampilkan salah satu contoh perubahan ini: spaghetti dengan saus daging, salad Prancis, puding, dan susu (Isozaki & Isozaki, 2024).

Kebijakan Makan Siang Gratis dari Era Soeharto hingga Prabowo

Pada Orde Baru, yang dimulai setelah G30S 1965 dan dipimpin oleh Presiden Soeharto, pertanian di Indonesia menjadi pusat strategi dan prioritas pembangunan. Tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk mengubah kondisi ekonomi dan gizi Indonesia, yang pada waktu itu termasuk yang terendah di Asia. Ketika Soeharto resmi mengambil alih kekuasaan pada tahun 1967, tingkat gizi di Indonesia kurang dari 80% dari kebutuhan dasar, menunjukkan betapa pentingnya melakukan perubahan. Pemerintah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama dalam perjalanan menuju transformasi ini. Pemerintah berusaha untuk mengembangkan tanaman pangan, terutama tanaman untuk konsumsi domestik. Dengan populasi yang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan negara (Situmorang, 2024).

Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan salah satu kebijakan nasional

yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak usia sekolah di Indonesia. Program ini pertama kali dicanangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 sebagai upaya mengatasi masalah gizi buruk dan *stunting* yang dapat menghambat pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual anak (Fasha & Tesniyadi, 2024). Pelaksanaan program ini berlangsung sejak tahun 1997 hingga tahun 2000 dengan sasaran utama anak-anak usia sekolah dasar (6–14 tahun). Melalui PMT-AS, pemerintah berupaya menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu guna memenuhi kebutuhan gizi mereka. Namun, setelah tahun 2000, program ini tidak berjalan secara merata di seluruh daerah dan hanya berlanjut di beberapa wilayah yang melaksanakannya secara mandiri.

Penyaluran makan gratis di zaman orba (Orde Baru) bergantung pada pendataan warung yang terlibat dalam program ini dan kupon yang dapat ditukarkan dengan makanan gratis. Departemen Sosial selaku pihak yang menjalankan program makan gratis bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan kantor agraria untuk mencari lahan tidur atau tanah yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk ditanami dengan tanaman produktif (Sekolah, 2013).

Pada masa Orde Baru, program makan gratis pertama kali diterapkan di DKI Jakarta sebagai upaya membantu masyarakat yang terkena dampak krisis moneter. Program ini diawali dengan pembagian kupon makan gratis kepada lima walikota di Jakarta, yang kemudian didistribusikan melalui kelurahan dan RT/RW kepada para buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kupon ini, penerima bantuan bisa menukarnya dengan sebungkus nasi

lengkap dengan lauk dan sayur seharga Rp 1.500.

Pada 27 Maret 1998, sekitar 60 warung di Jakarta Utara melayani 3.000 pemegang kupon setiap harinya, sementara di Jakarta Selatan, 40 warung melayani 2.000 orang. Selain di Jakarta, program ini juga dijalankan di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Tanjung Mas. Dalam acara pembagian kupon makan gratis di Semarang, Tutut Soeharto turut hadir bersama Gubernur Jawa Tengah, Soewardi. Saat itu, pemerintah mencatat bahwa 2,3 juta penduduk Jawa Tengah hidup di bawah garis kemiskinan, dengan 1.900 keluarga tergolong prasejahtera dan lebih dari 280 ribu orang kehilangan pekerjaan akibat krisis (Dwijayanti, 2024).

Namun, program ini tidak berjalan mulus. Banyak warung yang merugi karena sejumlah orang meminta makan gratis tanpa memiliki kupon atau langsung pergi setelah makan tanpa membayar. Bahkan, warung yang tidak ditunjuk sebagai penyedia makan gratis ikut diserbu masyarakat yang berharap mendapatkan makanan. Akibat berbagai kendala serta kondisi politik yang semakin tidak stabil, program makan gratis ini tidak berlangsung lama. Dua bulan setelah program berjalan, pergolakan politik memuncak, dan Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada Mei 1998. Bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, program makan gratis ini pun ikut terhenti (Situmorang, 2024).

Pada tahun 2010, data menunjukkan bahwa 13,3% anak laki-laki dan 10,9% anak perempuan mengalami hambatan pertumbuhan fisik akibat gizi buruk. Selain itu, angka putus sekolah di beberapa provinsi tercatat

melebihi 3%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah kembali memperkuat pelaksanaan PMT-AS dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah (Triana & Amali, 2024). Dalam implementasinya, program ini mengutamakan penyediaan kudapan sehat yang berasal dari bahan pangan lokal. Dengan pendekatan ini, PMT-AS tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam penyediaan makanan sehat serta mendukung perekonomian lokal. Program makan siang gratis dapat dilihat sebagai sebuah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Purwanti, 2024).

Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, program ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan daya pikir generasi mendatang. Negara-negara maju seperti Jepang dan Finlandia telah membuktikan bahwa kebijakan serupa berdampak positif pada prestasi akademik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat memberikan efek ekonomi yang luas. Jika pemerintah memberdayakan petani lokal dan UMKM sebagai pemasok bahan pangan, maka akan terjadi peningkatan produksi pertanian dan distribusi makanan, yang pada akhirnya memperkuat sektor ekonomi domestik. Jika dikelola dengan transparansi dan efisiensi, program makan siang gratis bukan sekadar beban anggaran, tetapi dapat menjadi pilar penting dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera (Zaman et al., 2024).

Salah satu temuan penting dari penelitian tersebut adalah bahwa strategi promosi makanan yang baik dapat

mengurangi jumlah makanan yang terbuang. Jika program makan siang gratis diterapkan di Indonesia, edukasi gizi menjadi hal yang sangat penting agar siswa memahami manfaat makanan yang diberikan dan mengonsumsinya dengan baik (Dwijayanti, 2024). Selain itu, waktu dan durasi makan siang juga berpengaruh terhadap jumlah makanan yang terbuang. Sekolah yang memberikan waktu makan siang setidaknya 30 menit memiliki tingkat pemborosan makanan yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah yang memberikan waktu makan yang lebih singkat. Oleh karena itu, kebijakan makan siang gratis di Indonesia perlu mempertimbangkan jadwal makan yang optimal agar siswa dapat menikmati makanan tanpa terburu-buru (Bean et al., 2023).

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah lokasi sekolah. Studi menunjukkan bahwa sekolah di daerah pedesaan atau pinggiran kota cenderung mengalami pemborosan makanan yang lebih tinggi, terutama untuk sayuran. Hal ini mengindikasikan bahwa menu makan siang perlu disesuaikan dengan selera dan kebiasaan makan lokal agar makanan yang disediakan dapat dikonsumsi sepenuhnya. Selain faktor geografis, latar belakang budaya juga mempengaruhi kebiasaan makan siswa. Jika menu yang diberikan dalam program makan siang gratis tidak sesuai dengan preferensi makanan daerah, maka ada kemungkinan makanan akan lebih banyak terbuang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan penelitian mendalam terkait pola konsumsi makanan di berbagai wilayah sebelum menetapkan menu standar dalam program yang akan dilaksanakan berikutnya.

Evaluasi terhadap program makan bergizi gratis dalam konteks Indonesia mencakup beberapa aspek penting:

1. Keberlanjutan Pendanaan. Program ini menghadapi tantangan dalam pendanaan jangka panjang. Dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme distribusi yang transparan agar program dapat berjalan efektif tanpa korupsi atau penyalahgunaan dana.
2. Infrastruktur dan Distribusi. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki fasilitas dapur atau akses mudah ke bahan makanan bergizi. Wilayah terpencil dan tertinggal sering mengalami kendala logistik yang dapat menghambat keberlanjutan program.
3. Standar Gizi dan Pengawasan. Program makan gratis harus memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak. Pengawasan ketat diperlukan agar makanan yang disediakan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
4. Dampak Sosial dan Pendidikan. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, mengurangi angka malnutrisi, dan meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar. Namun, perlu ada evaluasi berkelanjutan untuk memastikan program benar-benar berdampak positif terhadap pendidikan dan kesehatan siswa.
5. Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang

baik, program ini bisa terhambat oleh birokrasi dan kurangnya dukungan di tingkat lokal.

Agar program makan bergizi gratis di Indonesia dapat mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendanaan, infrastruktur yang memadai, serta distribusi yang merata, terutama bagi daerah terpencil dan kurang berkembang. Selain itu, standar gizi yang ketat harus diterapkan dengan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan benar-benar mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak. Program ini juga perlu dikaitkan dengan pendidikan gizi di sekolah agar siswa tidak hanya menerima manfaat jangka pendek, tetapi juga memahami pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan mereka. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat, program ini dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi malnutrisi, meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan siap berkontribusi bagi pembangunan negara. Jika diterapkan dengan baik, program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi solusi untuk masalah kesehatan anak-anak tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Kebijakan makan siang gratis telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan siswa di berbagai negara. Studi ini membandingkan kebijakan makan siang gratis di Indonesia dengan beberapa negara lain yang menerapkannya,

meninjau dampaknya terhadap gizi dan pembelajaran siswa. Dari kajian sejarah, ditemukan bahwa kebijakan ini pertama kali diterapkan secara luas di Swedia pada awal abad ke-20, yang kemudian diadopsi oleh banyak negara lain seperti Amerika dan Jepang. Negara-negara yang telah lama menjalankan kebijakan ini menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan status gizi, kehadiran siswa yang lebih stabil, serta peningkatan prestasi akademik. Temuan menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan asupan gizi siswa, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, penelitian juga mengindikasikan bahwa makan siang gratis dapat berdampak pada konsentrasi belajar, mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan kesejahteraan sosial siswa.

Program makan bergizi gratis di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keberlanjutan pendanaan, di mana diperlukan alokasi anggaran yang stabil serta mekanisme distribusi yang transparan agar program berjalan efektif tanpa penyalahgunaan dana. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan distribusi menjadi hambatan, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Standar gizi dan pengawasan juga harus diperhatikan agar makanan yang disediakan tidak hanya mengenyangkan tetapi benar-benar mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, mengurangi angka malnutrisi, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan

masyarakat agar program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Auliawan, A. G., & Harsiwi, W. (2025). Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *KIRYOKU*, 9(1), 184–197.
- Ayurisyah Dominata Dumiadi, R. M. R. M. M. D. F. F. A. A. K. S. S. E. A. S. N. B. A. M. A. J. F. S. L. R. S. H. H. S. S. F. A. A. R. D. B. Y. H. M. T. D. A. M. A. I. L. N. P. A. H. H. O. A. S. R. F. P. L. I. M. A. R. W. F. A. A. (2025). *KEBIJAKAN PUBLIK BERKELANJUTAN UNTUK TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK*. Penerbit P4I. <https://books.google.co.id/books?id=NEBDEQAAQBAJ>
- Azizi, A. D., & Vera, N. (2024). ANALISIS RESEPSI KHALAYAK TERHADAP PEMBERITAAN MAKAN SIANG GRATIS DI MEDIA MASSA. *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 5(4), 522–536.
- Bean, M. K. ... Buscemi, J. (2023). Free healthy school meals for all as a means to advance child health equity. *JAMA Pediatrics*, 177(8), 753–754.
- Calvert, H. G. ... Turner, L. (2021). Prevalence of evidence-based school meal practices and associations with reported food waste across a national sample of US elementary schools. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8558.
- Chandran, A. ... Gern, J. (2023). Changes in body mass index among school-aged youths following implementation of the Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010. *JAMA Pediatrics*, 177(4), 401–409.
- Chote, B. ... D'Souza, E. (2022). Culture of healthy eating and food environments, policies, and practices in regional New Zealand schools. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(11), 6729.
- Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 281–308.
- Fasha, S. S., & Tesniyadi, D. (2024). Analisis Wacana Kritis Pada Artikel Tempo.co Yang Berjudul "Dana BOS Untuk Program Makan Siang Gratis". *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 15077–15089.
- Gosliner, W. ... Long, C. (2022). The California nutrition incentive program: participants' perceptions and associations with produce purchases, consumption, and food security. *Nutrients*, 14(13), 2699.
- Hardi, E. ... Rusdinal, R. (2023). Kontribusi Nilai-Nilai Falsafah Dan Budaya Hidup Bangsa Jepang Bagi Kemajuan Pendidikan Jepang Pasca Perang Dunia II. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 5(2), 133–146.
- Harliawan, M. (2024). Keterkaitan Prestasi Olahraga dan Prestasi Akademik "Menemukan Keseimbangan Optimal dalam Tumbuh Kembang Siswa. *Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 7(2), 385–394.

- Hock, K. ... Hammond, D. (2022). Awareness of and participation in school food programs in youth from six countries. *The Journal of Nutrition*, 152, 85S-97S.
- Holford, A., & Rabe, B. (2024). Universal free school meals and children's bodyweight. Impacts by age and duration of exposure. *Journal of Health Economics*, 98, 102937.
- Isozaki, T., & Isozaki, T. (2024). Food and nutrition education (Shokuiku) as a part of STEAM education. In *Theory and Practice of STEAM Education in Japan* (pp. 99–113). Routledge.
- Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Komang, Y. K., & Nurita, W. (2024). Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Implementasi Budaya Kyuushoku (Makan Siang di Sekolah). *Jurnal Daruma: Linguistik, Sastra Dan Budaya Jepang*, 4(02), 113–124.
- Maharani, P. A. ... Chairunnisa, T. V. (2024). Peran makan siang gratis dalam janji kampanye prabowo gibran dan realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 1–10.
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373.
- Purwanti, Z. (2024). Pemodelan Text Mining untuk Analisis Sentimen Terhadap Program Makan Siang Gratis di Media Sosial X Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(3), 3065–3079.
- Rahmawati, N. A. ... Ramadhani, M. W. (2024). Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan: (Analisis Wacana Kritis Visi Dan Misi Prabowo Gibran Dalam Prespektif Modernisasi). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 97–120.
- Ribawati, E. (2022). Penerapan Metode Neurosains dalam Pembelajaran Sejarah. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(1), 1–10.
- Richardson, A. S. ... Datar, A. (2022). Association of the Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010 with body mass trajectories of children in low-income families. *JAMA Network Open*, 5(5), e2210480–e2210480.
- Rokhmaniyah, M. P. ... Mahmudah, U. (2022). *Anak putus sekolah, dampak, dan strategi mengatasinya*. CV Pajang Putra Wijaya.
- Safitri, R. N., & Fitriana, D. A. (2022). Peran Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Terhadap Status Gizi Anak. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 5(1), 955–960.
- Sanborn, A. A., & Omori, K. (2024). *A Whole Systems Approach to School Food Policy in Japan*.
- Sanders, M. T. ... Heinrichs, B. S. (2020). Longitudinal associations linking

- elementary and middle school contexts with student aggression in early adolescence. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 48(12), 1569–1580.
- Sekolah, E. P. P. M. T. bagi A. (2013). *Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP)*.
- Septiani, F. I. ... Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 191–196.
- Setyosari, H. P. (2016). *Metode penelitian pendidikan & pengembangan*. Prenada Media.
- Situmorang, R. T. (2024). Analisis Framing Logika Media Terkait Pemberitaan Program Kampanye Makan Siang dan Susu Gratis. *Jurnal Jurnalisa*, 10(1).
- Srimayarti, B. N., & Yenni, R. A. (2021). Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). *ARKESMAS*, 6(2), 20–24.
- Sukmana, O. (2022). *Dasar-dasar kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Vol. 1). UMMPress.
- Susanto, H. P. (2021). *Pandemi dan Anak Bangsa Menjadi Pintar*. Tsaqiva publishing.
- Thorndike, A. N. ... Schwartz, M. B. (2022). Strengthening US food policies and programs to promote equity in nutrition security: a policy statement from the American Heart Association. *Circulation*, 145(24), e1077–e1093.
- Triana, F. R. D., & Amali, M. T. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Program Kerja Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dalam Media Online Liputan6. Com Dan Republika. co. id. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 603–614.
- Turner, L. ... Chriqui, J. F. (2021). Can monitoring make it happen? An assessment of how reporting, monitoring, and evaluation can support local wellness policy implementation in US schools. *Nutrients*, 13(1), 193.
- Zaman, F. N. ... Umam, K. (2024). Menganalisis Respons Netizen Twitter Terhadap Program Makan Siang Gratis Menerapkan Nlp Metode Naïve Bayes. *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 14(3), 201–208.